

BAB III

FAKTOR IDIOSINKRETIK JOKOWI DALAM PENINGKATAN STATUS KEMITRAAN STRATEGIS INDONESIA-KOREA SELATAN

Kepribadian merujuk pada perbedaan individual dalam pola karakteristik berpikir, merasakan, dan berperilaku. Idiosinkretik dalam dunia psikologi dikatakan sebagai sebuah tipe kepribadian yang tidak umum, atau dapat dikatakan sebagai tipe kepribadian yang unik dan original (Oldham & Morris, 1995). Pembahasan dalam bab ini menitikberatkan pada pengaruh faktor idiosinkretik Jokowi dalam peningkatan status kemitraan strategis Indonesia-Korea Selatan. Penggunaan faktor karakter personal pemimpin negara dalam pembahasan ini lebih menekankan pada latar belakang kehidupan pemimpin, dan karakter personal dalam diri pemimpin, mengingat hal tersebut sangat penting dalam menelisik asal-usul kebijakan yang diambil. Latar belakang kehidupan merupakan aspek penting dalam melihat cerminan karakter pada diri seseorang dalam memimpin dan membuat kebijakan. Latar belakang ini akan menjadi dasar bagi seseorang untuk membangun kebijakan maupun menjadikannya dasar menjalin hubungan dengan negara lain. Sedangkan personal karakter dalam diri seorang pemimpin akan mencerminkan bagaimana ia akan melaksanakan kebijakan maupun menjalin hubungan dengan negara lain.

Pembahasan dalam bab ini akan tetap berfokus pada analisis biografi objek penelitian, analisis isi pidato atau pernyataan yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang melatarbelakangi peningkatan status kemitraan strategis Indonesia-Korea Selatan, dalam hal ini adalah diplomasi ekonomi. Mengingat studi kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah peningkatan status kemitraan strategis, dimana kemitraan strategis Indonesia-Korsel lebih menitikberatkan pada kerjasama ekonomi, maka hal-hal yang dianalisis akan lebih banyak berkaitan dengan kebijakan diplomasi ekonomi dan kerjasama ekonomi disandingkan dengan mekanisme kerjasama abad 21, yaitu *summit diplomacy*.

Bagian pertama akan membahas mengenai latar belakang kehidupan Jokowi, sejak ia menjadi walikota hingga menjabat sebagai presiden. Bagian kedua akan membahas orientasi kebijakan luar negeri Jokowi. Mengingat bahwa kebijakan luar negeri berkaitan erat dengan hubungan bilateral, maka orientasi kebijakan luar negeri tidak boleh luput dari pembahasan. Bagian ketiga akan menjelaskan mengenai faktor idiosinkratik Jokowi berpatok pada kerangka pendekatan idiosinkretisme menurut Margareth Hermann dengan mengambil beberapa poin; *nationalism, belief in own ability to control, need of affiliation, conceptual complexity*, dan *distrust to others*. Lalu akan ditentukan mengenai tipe *aggressive* dan *conciliatory*. Bagian terakhir merupakan kesimpulan.

Argumen dalam bab ini adalah Jokowi merupakan seorang pemimpin tipe moderat yang memiliki gaya tersendiri dalam implementasi kebijakan luar negeri. Namun demikian faktor idiosinkretik tidak dapat disandingkan secara langsung dengan skema hubungan bilateral, melainkan harus disertai dengan analisis kebijakan luar negeri sebagai pondasi skema hubungan bilateral.

III.1 Latar belakang kehidupan Jokowi

Joko Widodo lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Rumah Sakit Brayat Minulya, Solo. Ia tinggal berpindah-pindah dari rumah kontrakan ke rumah kontrakan di pinggir sungai di Solo. Jokowi lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai penjual kayu dan bambu. Keluarganya sempat digusur oleh pemerintah kota Solo dari tempat tinggalnya di bantaran kali Pepe dan terpaksa harus hidup menumpang dengan salah satu kerabat di daerah Gondang (Endah, 2019). Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 1985. Tahun berikutnya ia sempat bekerja di sebuah perusahaan BUMN di Aceh selama kurang lebih dua tahun di tengah hutan dengan membawa serta istrinya, Iriana. Lokasi kerja di tengah hutan, ditambah dengan kondisi kerja yang keras, dan rencana untuk mempunyai buah hati mendorong Jokowi dan istri kembali ke Solo tahun 1988. Ia kemudian bekerja sementara waktu di pabrik *pakdhenya*, hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti dan memulai usaha mebelnya sendiri. Usaha mebelnya berkembang

perlahan namun pasti, mulai dari pasar lokal, regional, nasional hingga mancanegara (Endah, 2019). Karir bisnisnya melejit dan dapat dikatakan cukup sukses. Kesuksesan itu mendorongnya untuk mulai mencurahkan energi pada ranah lain, yaitu sosial. Dengan latar belakang masa lalunya yang sulit, ia dan beberapa rekan sesama pengusaha menggagas pembentukan organisasi pengusaha mebel nasional cabang Solo yang bernama Asosiasi pengusaha Mebel Indonesia atau biasa disebut Asmindo. Jokowi didaulat menjadi ketua Asmindo dan berhasil membawa organisasi tersebut melaksanakan kegiatan yang mampu meningkatkan daya usaha para pengusaha kecil dan menengah anggota Asmindo. Dari sinilah cikal bakal karir politik Jokowi dimulai (Endah, 2019).

Ide pencalonan Jokowi sebagai walikota Solo pertama kali dilontarkan oleh pengurus dan anggota Asmindo, setelah dua tahun ia menjadi ketua Asmindo. Dorongan anggota dan rekan-rekan sesama pengusaha di Asmindo membuat Jokowi akhirnya maju menjadi calon walikota di pilkada Solo 2005. Selama masa kampanye, Jokowi dikenal sebagai sosok yang senang melakukan "*blusukan*"¹ ke daerah-daerah kumuh di sekitar kota Solo. Jokowi maju bersama F.X Hadi Rudyatmo dan terpilih menjadi walikota Solo periode 2005-2010. Selama itu ia dikenal dengan kebijakan yang merakyat dan berhasil melakukan gebrakan. Pada pilkada 2010, ia terpilih kembali menjadi walikota periode 2010-2015. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi terkenal dengan kebijakan yang humanis dan mengutamakan rakyat. Jokowi cenderung menghindari konflik dan mengutamakan dialog dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini ia ungkapkan dalam biografinya, ketika ia hendak memindahkan 5.000 PKL (Pedagang Kaki Lima) yang memenuhi area-area monumental dan mengganggu ketertiban kota. Di saat semua rekan kerjanya menyarankan untuk menggunakan cara lama untuk menggesur PKL, Jokowi justru memilih jalan dialog (Endah, 2019). Agus Dwidoso Warsono dalam disertasinya mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Solo menggunakan model relokasi yang humanis dan santun melalui pendekatan falsafah Jawa, yaitu; *Nguwongke Uwong* (memanusiakan manusia) dan *Wong*

¹ Kunjungan ke area kumuh disertai dengan bincang-bincang dengan masyarakat sekitar. *Blusukan* merupakan strategi kampanye Jokowi sejak menjadi calon walikota Solo tahun 2005 (Endah, 2019).

Jawa Dipangku Mati (orang jika dijunjung maka akan menghormati) (Saputro, 2017).

Hal ini sejalan dengan apa yang dipegang teguh Jokowi, bahwa rakyat harus merasa bahwa mereka dimanusiakan. Caranya dalam menggunakan dialog untuk menyampaikan ide pemindahan PKL dapat dikatakan memenuhi aspek karakter personal *need of affiliation* atau memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi. Selain itu, Jokowi juga menunjukkan kepercayaan yang tinggi dalam usahanya membuka dialog dengan kalangan PKL, ia percaya jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sabar maka caranya akan berhasil. Hal ini menunjukkan kepercayaannya dalam menciptakan dan menginisiasi suatu keadaan. Jokowi berusaha menciptakan kontrol namun bukan dengan cara kekerasan melainkan dengan dialog. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki kepercayaan yang tinggi dalam mengontrol keadaan. Selain pemindahan ribuan PKL, selama menjadi walikota Solo, Jokowi banyak menerapkan kebijakan baru. Misalnya, menciptakan *city branding* dengan membuat konsep *The Spirit of Java* sebagai upaya menumbuhkan kesadaran budaya di Solo. Lebih dari itu, Jokowi juga menggelar berbagai acara untuk menguatkan *city branding* Solo. Misalnya Solo Batik Carnival, Solo Batik Fashion, Solo City Jazz, Festival Wayang Cilik, Lomba Keroncong, Kreaso (Kreasi Anak Sekolah Solo), dan Solo International Ethnic Music Festival (Endah, 2019). Melalui kegiatan ini, Jokowi berusaha mendapatkan kembali kota Solo yang identik dengan budaya daripada Solo yang mulai tergerus modernitas. Dalam hal ini, Jokowi berusaha mendapatkan afiliasi untuk mengembangkan Solo dengan menarik perhatian orang luar dan menunjukkan bagaimana idenya membangun Solo akan jadi keputusan yang bagus. Setali tiga uang, Jokowi juga berhasil mengungkapkan idenya melalui cara yang menyenangkan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ia memiliki kompleksitas konseptual yang tinggi dengan memanfaatkan satu kebijakan untuk meraih banyak luaran. Di sisi lain, Jokowi sekaligus mengafirmasi rasa nasionalismenya dengan mempertahankan identitas Solo sebagai kota budaya.

Jokowi sempat membuat gebrakan dengan industrialisasi mobil ESEMKA. Jokowi memiliki keyakinan bahwa usahanya memfasilitasi produksi mobil karya

anak bangsa ini merupakan upaya untuk menumbuhkan sektor industri otomotif di Indonesia. Langkah revolusioner Jokowi ini juga menunjukkan nasionalisme bahwa rasa nasionalismenya begitu tinggi. Hal ini diperkuat oleh sikapnya yang menolak investor AS yang ingin membantu pengembangan mobil ESEMKA. Ia beralasan jika investasi itu ia terima, ESEMKA bisa jadi mobil AS dan bukannya mobil Indonesia (Ambarita, 2013). Gebrakan lain yang ia lakukan selama menjadi walikota Solo adalah pembenahan birokrasi. Ia menyebutkan bahwa gebrakan itu ia lakukan untuk membenahi gaya kerja pegawai pemerintah kota. Jokowi rajin melakukan sidak, pemeriksaan hasil kerja secara berkala hingga perubahan manajemen. Ia ingin pegawai pemkot menjadi lebih aktif dan produktif. Hal ini mencerminkan bahwa Jokowi memiliki kontrol penuh atas pemerintahannya. Ia ingin menciptakan suatu keadaan yang ideal menurut versinya (Endah, 2019).

Belum genap dua periode memimpin Kota Solo, pada tahun 2012, Jokowi diusung menjadi gubernur DKI Jakarta. Disandingkan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) –mantan bupati Bangka Belitung, Jokowi dihadapkan pada dua pilihan; ingin tetap membenahi Solo atau mengambil tanggungjawab lebih besar di Jakarta. Ia memilih untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Majulah ia bersama Ahok menjadi salah satu calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Keduanya berhasil memenangkan pilgub putaran pertama dengan hasil 48% suara. Namun demikian suara itu belum cukup untuk memenuhi syarat kemenangan. Pilgub DKI dilaksanakan dua putaran. Hasil yang tak disangka Jokowi memenangkan pemilihan dan mengalahkan *incumbent* Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli (Ambarita, 2013). Di Jakarta, Jokowi dihadapkan pada berbagai permasalahan yang lebih pelik daripada di Solo. Ia menyampaikan dalam biografinya, bahwa di Jakarta rumus kepemimpinannya tidak bisa lagi sederhana di Solo. Ia lebih menyoroti akar permasalahan di DKI cenderung berupa pembiaran dan ketidakberesan. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi memiliki analisis yang cukup baik dalam merencanakan kepemimpinannya. Kompleksitas konseptualnya kembali diuji dengan menerapkan kebijakan yang reformis. Namun demikian selama 2 tahun menjabat sebagai Gubernur, Jokowi cenderung menerapkan kebijakan yang sama dengan yang ia lakukan di Solo.

Pembenahan birokrasi, kali ini pembenahan yang dilakukan Jokowi lebih mengerucut hingga ke pegawai kelurahan. Ia ingin menunjukkan kontrol terhadap pemerintahannya dengan menerapkan cabut dan lelang jabatan bagi pegawai yang tidak produktif. Jokowi percaya bahwa masih banyak orang yang kompeten dan mau melakukan pekerjaan dengan baik (Endah, 2019). Ini sekaligus membuktikan bahwa Jokowi menaruh kepercayaan yang tinggi pada kompetensi pegawai negeri di DKI Jakarta dengan menyerahkan posisi yang dilelang kepada mereka yang merasa kompeten. Selain itu, Jokowi juga banyak meluncurkan gebrakan dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Ia meluncurkan kartu-kartu untuk menunjang kehidupan masyarakat rentan. Misalnya, KJS (Kartu Jakarta Sehat) dan KJP (Kartu Jakarta Pintar). Kedua kartu ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga berupa kesehatan dan pendidikan. Jokowi mungkin sudah menimbulkan pro dan kontra dalam caranya memimpin dan menerapkan gebrakan-gebrakan dengan memangkas berbagai anggaran gemuk. Dengan meluncurkan kebijakan yang mampu mengambil hati rakyat, Jokowi berupaya untuk mendapatkan afiliasi masyarakat, sekaligus menjadikannya cara yang pas untuk menyampaikan ide besar pembenahan Jakarta. Di sisi lain, Jokowi juga masih melakukan *blusukan* untuk terus mendengar secara langsung permasalahan masyarakat. Blusukan ini menjadi identitasnya sebagai pemimpin, sekaligus upaya membangun rasa kepercayaan masyarakat.

Sama halnya dengan permasalahan di Solo, tata kota menjadi suatu pekerjaan rumah yang betul-betul membutuhkan perhatian lebih. Masalah banjir, kepadatan jalur transportasi, dan sudut-sudut kumuh di wajah ibukota mendorong Jokowi untuk bekerja ekstra. Ia membangun Waduk Pluit untuk mengurangi banjir sekaligus membuat saluran yang memadai. Bagi warga yang tinggal di sekitar area Waduk Pluit, ia bangunkan rumah susun untuk merelokasi mereka. Kawasan sekitar Waduk Pluit memang merupakan daerah yang amat kumuh dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Mayoritas berasal dari kalangan bawah. Hambatan yang ada diuraikan dengan dialog terus-menerus dengan warga. Hingga pada akhirnya membuahkan hasil dengan keberhasilan rehabilitasi dan peremajaan kota. Pemahaman kompleks mengenai resiko dan kemungkinan

terberat yang akan dihadapi dalam setiap implementasi kebijakan membuat Jokowi bisa mengantisipasi setiap kemungkinan yang ada. Didukung dengan kemampuan berdialog dan menumbuhkan rasa percaya masyarakat, Jokowi dapat dikatakan cukup berhasil dalam membenahi Jakarta. Keberhasilannya menjadi walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta mengantarkannya menjadi kandidat calon presiden. Lagi-lagi ia diusung untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar.

Tahun 2014, Jokowi ditunjuk menjadi calon presiden dari PDI-P. Disandingkan dengan Jusuf Kalla, ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 periode 2014-2019 (Endah, 2019). Terpilihnya Jokowi menjadi Presiden RI menambah deretan baru latar belakang Presiden Republik Indonesia; ia berasal dari kalangan masyarakat sipil. Ia juga merupakan presiden pertama Indonesia yang tidak berasal dari kalangan politik maupun kalangan elit militer (Thatcher & Kapoor, 2014). Jokowi berasal dari generasi politik yang berbeda, ia merupakan politikus yang *low-profile* tapi bisa menyelesaikan persoalan (Paul Rowland dalam Thatcher & Kapoor, 2014). Latar belakang Jokowi yang berasal dari masyarakat sipil mendorong kebijakan luar negerinya mengarah pada kepentingan domestik.

Selama menjadi presiden, model kebijakan Jokowi sama dengan menjadi walikota Solo dan Gubernur DKI, hanya saja dengan wadah yang jauh lebih besar, yaitu Indonesia. Menjadi presiden Indonesia berarti memiliki tanggungjawab yang besar. Dalam merumuskan kebijakannya, Jokowi mengajak staf pribadinya untuk berdiskusi. Jokowi bahkan memiliki seorang sahabat yang setia mendampingi sejak mencalonkan diri menjadi walikota Solo, Anggit. Anggit kini menjadi sekretaris pribadi Jokowi. Selain Anggit, Jokowi juga memiliki ajudan setia sejak menjadi walikota Solo, David. Dalam bekerja, Jokowi cenderung memilih orang-orang terdekat yang ia percaya untuk berdiskusi. Selain itu, ia juga senang menciptakan iklim diskusi yang terintegrasi untuk membangun kepercayaan di lingkungan kerja (Endah, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi memiliki kepercayaan yang tinggi pada rekan kerjanya. Selama menjadi Presiden, Jokowi menghadirkan banyak kebijakan yang seringkali kontroversial. Misalnya saja,

pembangunan infrastruktur menyeluruh di Indonesia. Banyak yang mengkritik kebijakan ini lantaran menyebut bahwa rakyat Indonesia lebih butuh bantuan langsung ketimbang pembangunan infastruktur. Namun, Jokowi justru menjawab dengan pemahaman yang betul-betul menunjukkan bahwa ia memiliki kompleksitas konseptual yang tinggi mengenai suatu keadaan. Ia membuat *grand design* pembangunan infrastruktur yang menyeluruh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun konektivitas di Indonesia. Menurutnya, pembangunan infrastruktur adalah syarat utama dan mendasar untuk memperkuat fundamental perekonomian. Jokowi juga menyebutkan bahwa pilihannya membangun infrastruktur bukanlah keputusan yang akan mendapatkan hasil instan. Ia menyebut bahwa membangun infrastruktur itu seperti menggoreng telur. Pinggirnya dulu yang matang baru tengahnya (Endah, 2019).

Selain pembangunan infrastruktur, Jokowi juga menerapkan kebijakan terkait *IUU Fishing*. Ia meminta Menteri Susi –Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menerapkan kebijakan peneggelaman kapal asing yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia. Kebijakan tersebut tidak sedikit menuai protes dan pujian. Jokowi banyak mendapat respon negatif terkait kebijakan ini, namun ia justru menjawab dengan santai bahwa mencuri tetaplah mencuri, apakah akan didiamkan begitu saja. Melalui kebijakan ini, dapat dilihat bahwa Jokowi memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam mengontrol suatu keadaan. Serta cenderung memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsanya. Tercermin dari caranya melindungi kepentingan dalam negeri Indonesia.

Dalam sektor ekonomi, Jokowi melakukan beberapa kebijakan yang mungkin dilihat orang lain sebagai sebuah kesia-siaan. Misalnya keputusan untuk mendapatkan saham Freeport sebanyak 51,2% agar kembali menjadi milik Indonesia, atau kebijakan *tax amnesty*. Kedua kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengembalikan iklim investasi dalam negeri. Tidak dapat dipungkiri, bahwa Jokowi memiliki pemahaman yang baik dalam merumuskan suatu kebijakan. Tidak hanya didasarkan pada kepentingan domestik, namun juga memiliki dampak jangka panjang dan bersifat futuristik. Lagi-lagi, kompleksitas konseptual Jokowi dalam

hal ini dapat dikatakan cukup tinggi. Pun sama halnya dengan rasa nasionalismenya, serta caranya membangun kepercayaan melalui tindakan dan pendekatan yang ia lakukan. Jokowi merupakan sosok pemimpin yang memiliki karakter personal yang kompleks, kadang ia terlihat agresif dengan kebijakannya, kadang ia menjadi sosok konsiliator yang terbuka pada kerjasama. Lantas bagaimana dengan kebijakan yang terkait dengan kerjasama bilateral, apakah Jokowi juga menunjukkan konsistensi dalam karakter personalnya? Berikutnya akan dibahas mengenai kebijakan luar negeri Jokowi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kerjasama bilateral, yaitu diplomasi ekonomi.

III.2 Orientasi Kebijakan Luar Negeri Jokowi

Kepemimpinan Jokowi menandai berakhirnya pendekatan kebijakan luar negeri “*thousand friends, zero enemies*” SBY. Sebagai gantinya, Jokowi berpendapat mengenai pendekatan transaksional yang jauh lebih menguntungkan Indonesia. Hal ini juga dipandang sebagai sinyal kebijakan luar negeri yang lebih mandiri bagi Indonesia (Lundry, 2018). Latar belakang Jokowi yang berasal dari masyarakat biasa membuatnya tidak memiliki banyak pengalaman di dunia internasional. Sebagai seorang presiden, Jokowi lebih berfokus pada pengembangan infrastruktur, memperkenalkan dan melanjutkan proyek pembangunan yang mangkrak berupa jalan tol, kereta cepat, bandara, dan fasilitas lain untuk membangun konektivitas di Indonesia (The Straits Times, 2018). Dalam pemerintahannya, Jokowi menerapkan prinsip politik luar negeri bebas-aktif dengan menitikberatkan pada interpretasi yang lebih luas mengenai kebijakan luar negeri. Termasuk interpretasi mengenai poin apa yang seharusnya menjadi poros kebijakan luar negeri (Situmorang, 2014). Pemerintahan Jokowi menitikberatkan pada “*protecting Indonesia’s sovereignty*” (Parameswaran, 2015). Hal ini dipengaruhi oleh visi-misi Jokowi dalam Nawa Cita.² Dalam poin-poin Nawa Cita, Jokowi cenderung mengutamakan kepentingan masyarakat

² Sembilan Agenda Pembangunan Prioritas yang dibawa oleh Jokowi sebagai visi-misi memimpin Indonesia. Nawa Cita kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) (UNDP INDONESIA COUNTRY OFFICE, 2015).

(*people-centred*). Sehingga jelas sekali bahwa agenda kebijakan luar negeri Jokowi adalah mengamankan kepentingan domestik (Andika, 2016).

Jokowi memiliki empat prioritas dalam kebijakan luar negeri yaitu; 1) mempromosikan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan; 2) meningkatkan peran global Indonesia dalam diplomasi kekuatan tengah (*middle-power diplomacy*); 3) memperluas peran di wilayah Indo-Pasifik; 4) menekankan diplomasi ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri (Connely, 2014). Menggunakan istilah '*pro-people diplomacy*' Jokowi ingin mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia semata untuk memenuhi kepentingan rakyat, melalui Kementerian Luar Negeri, dengan tiga fokus yaitu; 1) menjaga kedaulatan Indonesia, 2) meningkatkan perlindungan WNI dan 3) mengintensifkan diplomasi ekonomi (Andika, 2016).

Menurut Rosyidin (2017), kebijakan luar negeri Jokowi memiliki empat karakteristik utama. Pertama, kebijakan luar negeri Jokowi memperlihatkan adanya ideologi yang bersifat nasionalis, hal ini sangat berbeda jauh dengan kebijakan luar negeri SBY. Kedua, kebijakan luar negeri Jokowi memiliki tendensi untuk mempersempit kepentingan strategis Indonesia. Indonesia cenderung memfokuskan hubungan luar negerinya dengan ASEAN sebagai pondasi, serta saat ini memperluas hubungan melalui kawasan Indo-Pasifik. Hal ini termasuk juga di kawasan Asia Timur. Kebijakan ini sangat berbeda dari kebijakan SBY yang memfokuskan pada hubungan yang global dengan seluruh negara di dunia. Ketiga, Jokowi percaya bahwa kekuatan nasional berasal dari kemampuan domestik. Hal ini sangat amat mendorong diplomasi ekonomi untuk memainkan peran yang signifikan dalam praktek kebijakan luar negeri. Jokowi juga lebih menekankan pada hubungan bilateral ketimbang multilateral, Jokowi berfokus mengembangkan kemitraan strategis dalam bidang perdagangan dan investasi. Hal ini sejalan dengan "*pro-people diplomacy*". Terakhir, berbeda dengan SBY, Jokowi mengembalikan makna kepentingan nasional pada pemaknaan tradisional, yaitu untuk mendapatkan keuntungan material (Rosyidin, 2017). Karakteristik yang terakhir dalam kebijakan luar negeri Jokowi inilah yang mendorong upaya pelaksanaan kemitraan strategis dengan negara-negara partner.

Dalam hal ini, Jokowi lebih menekankan pada penerapan diplomasi ekonomi. Fakta bahwa kebijakan luar negeri Jokowi lebih menekankan pada praktek diplomasi ekonomi, mendorong pelaksanaan kemitraan strategis dengan banyak negara, salah satunya adalah Korea Selatan.

Diplomasi ekonomi merupakan penggunaan hubungan dan pengaruh pemerintah untuk menstimulasi perdagangan dan investasi internasional. Kegiatan dari berbagai unsur representasi internasional semi-permanen, institusi domestik, dan aktivitas bilateral diplomatik merupakan bagian dari diplomasi ekonomi. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi merupakan sebuah alat kebijakan luar negeri yang potensial bagi negara berkembang yang ingin membuat perusahaan domestiknya memasuki persaingan global (Moons & De Boer, 2014). Jokowi menggunakan kebijakan diplomasi ekonomi untuk mengembangkan industri dalam negeri Indonesia. Sesuai visi-misinya, Jokowi menekankan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain untuk lebih berfokus pada ekonomi ketimbang politik. Hal ini tercermin pada empat pilar diplomasi ekonomi Indonesia yaitu; 1) melakukan perluasan dan peningkatan akses pasar produk Indonesia dengan mendorong perubahan pola pikir para diplomat Indonesia agar lebih aktif melakukan diplomasi ekonomi, 2) penguatan kapasitas dan sumber daya perwakilan Indonesia di pasar non-tradisional, 3) mendorong investasi asing pada sektor prioritas Indonesia dan 4) melindungi investasi luar negeri Indonesia, serta pemanfaatan *ASEAN Economic Community* (AEC). Tidak hanya itu, diplomasi ekonomi Indonesia lebih menekankan pada pengoptimalan kerjasama perdagangan, investasi dan pariwisata (*Trade, Tourism, and Investment/TTI*). Lebih lanjut, tren saat ini menggambarkan bahwa kerjasama ekonomi Selatan-Selatan dan antar negara-negara berkembang semakin meningkat (Sabaruddin, 2016), mengakibatkan tren perekonomian di Asia cenderung meningkat dan menciptakan Asian Century (Kohli, 2011). Kebijakan diplomasi ekonomi Jokowi merupakan kunci Kemitraan Strategis Khusus dengan Korea Selatan. Berikutnya akan dianalisis mengenai faktor idiosinkretik dalam kebijakan diplomasi ekonomi dan kaitannya dengan peningkatan status kemitraan strategis partnership antar kedua negara.

III.3 Faktor Idiosinkretik Jokowi

Dilihat dari kebijakan luar negeri Jokowi yang berfokus pada diplomasi ekonomi, keputusannya untuk meningkatkan status kemitraan strategis antara Indonesia dan Korsel dapat dikatakan sebagai keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin tipe *conciliatory* –lebih lanjut disebut konsiliator. Menurut Hermann (1980), tipe pemimpin konsiliator cenderung memiliki rasa nasionalisme yang rendah, memiliki kebutuhan yang tinggi akan afiliasi, kepercayaan yang tinggi pada pihak lain, kompleksitas konseptual yang tinggi, dan memiliki kepercayaan yang rendah terhadap kemampuan mendominasi suatu keadaan. Pemimpin tipe konsiliator yang memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi cenderung senang melakukan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Namun demikian apakah benar Jokowi merupakan tipe pemimpin konsiliator seperti yang dicirikan Hermann? Berikut adalah uraian faktor karakter personal Jokowi dalam kebijakan diplomasi ekonomi dan kaitannya dengan peningkatan status kemitraan strategis Indonesia-Korea Selatan:

III.3.1 Nationalism

Nasionalisme menurut Hermann (1980) disebut sebagai pandangan yang menempatkan suatu negara pada tempat pertama. Biasanya pemimpin yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi cenderung untuk memiliki ikatan emosional yang tinggi dengan bangsanya dengan penekanan sikap yang mengutamakan kehormatan negara dan identitas nasional. Dapat dikatakan definisi nasionalisme menurut Hermann ini merupakan definisi yang tradisional, dimana kode operasional yang digunakan masih seputar bangsa dan negara dalam konteks tradisional dan hampir selalu berkaitan dengan penggunaan istilah ‘militer’, ‘berseteru’, atau istilah yang berkaitan dengan ‘lemah’ atau ‘kuat’ bahkan istilah ‘sikap campur tangan urusan negara lain’ yang erat kaitannya dengan kedaulatan suatu negara dalam pemaknaan tradisional (Hermann, 1980). Jika dilihat melalui definisi ini, seorang pemimpin dengan kebijakan luar negeri yang agresif dapat dikatakan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap

bangsanya. Sebaliknya, pemimpin dengan kebijakan luar negeri yang partisipatori justru memiliki rasa nasionalisme yang rendah.

Dalam hubungan bilateral, seorang pemimpin negara tidak dapat memaksakan nasionalismenya secara agresif. Termasuk dalam kebijakan luar negeri, suatu negara akan dengan serta merta memilah kebijakan mana yang akan dijadikan dasar untuk memulai kerjasama dan memilah mana yang sekiranya memberikan keuntungan. Dalam skema ini, definisi nasionalisme yang berjalan sudah bukan definisi nasionalisme tradisional seperti yang disebutkan oleh Hermann. Definisi nasionalisme pada abad 21 –khususnya pada skema kemitraan strategis, lebih mengarah pada nasionalisme politik dan ekonomi (Sraders, 2018).

Dalam kemitraan strategis khusus dengan Korea Selatan, Jokowi menggunakan kebijakan diplomasi ekonomi sebagai pondasi menjalin kerjasama. Diplomasi ekonomi, seperti yang sudah disebutkan pada subbab sebelumnya, merupakan agenda untuk mencapai kepentingan nasional sekaligus mempromosikan identitas nasional melalui skema perekonomian. Dalam hal ini, nasionalisme yang ada merupakan nasionalisme ekonomi. Meminjam definisi nasionalisme ekonomi Gilpin, ide utama aktivitas ekonomi adalah dan sudah seharusnya merupakan tujuan untuk membangun negara dan mencapai kepentingan nasional (Gilpin, 2001). Nasionalisme ekonomi juga disebut sebagai bentuk nasionalisme yang mempromosikan industri domestik, pekerjaan dan ekonomi lebih dari perusahaan multinasional dan perdagangan (Sraders, 2018). Kebijakan diplomasi ekonomi Jokowi justru mempromosikan segala aspek termasuk perusahaan multinasional hingga prospek pekerjaan dalam negeri. Pada dasarnya nasionalisme ekonomi merupakan sebuah cara untuk menciptakan, mendorong dan melindungi perekonomian nasional dalam konteks pasar global (Pryke, 2012). Kebijakan luar negeri Jokowi yang cenderung pro-rakyat merupakan bukti bahwa nasionalisme yang dimiliki cukup tinggi. Sekaligus merupakan sebuah bukti bahwa praktek nasionalisme bisa bergeser seiring pergeseran iklim hubungan internasional (Pryke, 2012).

Dalam beberapa kesempatan berbicara pada forum internasional, terutama dalam forum ekonomi, Jokowi seringkali mengungkapkan bahwa kesejahteraan

rakyat adalah yang utama. Bahwa kebijakan ekonominya merupakan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mendorong kesejahteraan rakyat. Dalam wawancara dengan situs berita *Bloomberg Market and Finance* (2017), Jokowi ditanya mengenai sejauh mana visinya berjalan sejak menjabat menjadi presiden, dan bagaimana mengenai perekonomian Indonesia. Jokowi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup baik untuk ukuran negara sebesar Indonesia, bahwa Indonesia sangat terbuka dengan investasi asing namun juga sangat memperhatikan kepentingan nasional Indonesia di tempat pertama.

Indonesia itu negara besar dengan populasi mencapai 250 juta, **kita ingin, semua pemimpin ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya**, dan saya kira, ini bagus, pertumbuhan 5% untuk ukuran negara sebesar ini itu bagus. Tapi memang, permasalahan terbesar kita adalah pertumbuhan ekonomi dunia yang lambat, jadi ekspor dan impor terbatas. Dan kedua, harga komoditas menurun, jadi ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia ... **Ya tentu saja, kepentingan nasional Indonesia harus tetap menjadi prioritas nomor satu**, tapi untuk menyebut Indonesia sebagai proteksionis saya rasa tidak bisa. Saya katakan bahwa Indonesia itu terbuka, Indonesia menyambut yang datang, karena seperti saya katakan tadi, kita ingin keterbukaan dan kompetisi, itu. Jadi kita sudah banyak membuka untuk investasi asing dari daftar negatif kita sudah buka, saya kira itu tidak hanya satu, dua atau tiga tapi banyak, **ini menunjukkan bahwa Indonesia itu terbuka** [cetak tebal ditambahkan] (Bloomberg Market and Finance, 2017).

Dalam pernyataan tersebut, Jokowi menekankan pada keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing dan perdagangan bebas dimana dua hal tersebut merupakan tonggak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pernyataannya sekaligus memberikan kesan bahwa ia merupakan pemimpin yang mementingkan kepentingan domestik, namun juga bukan pemimpin yang memiliki nasionalisme ekstrim dengan menutup perekonomian. Sebaliknya, justru dengan membuka keran perekonomian global mengalir di Indonesia, dapat digunakan untuk mencapai kepentingan nasional, sekaligus mencapai idealnya sebagai pemimpin yang nasionalis. Di sisi lain, Jokowi juga mengerahkan segala lini untuk mencapai kepentingan nasional melalui diplomasi ekonomi, salah satunya adalah dengan

mendorong para diplomat Indonesia untuk mempromosikan ekonomi Indonesia dan menumbuhkan investasi dua arah (Sheany, 2018).

Kita harus mendorong usaha dalam diplomasi ekonomi: untuk merebut kesempatan pada pasar tradisional dan menjadi lebih gigih dan serius dalam usaha ini. ... **Jangan merasa seakan kita ini negara kecil.** Kita harus siap untuk investasi, jadi usaha kita harus sinergis antara menarik investor tapi juga berinvestasi di negara lain [cetak tebal ditambahkan] (Sheany, 2018).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Jokowi menginginkan perwakilan Indonesia untuk gencar mempromosikan diplomasi ekonomi dalam kaitannya dengan keterbukaan ekonomi, dan investasi asing agar masuk ke Indonesia. Lebih dari itu, frasa yang ia sampaikan agar Indonesia tidak minder dan merasa sebagai negara kecil, sedikit banyak memperlihatkan bahwa ia ingin Indonesia menjadi negara yang memiliki identitas baru dalam pasar global dan menyadari perannya sebagai negara besar. Dalam forum *International Maritime Organization* (IMO) Jokowi sempat menyebutkan mengenai pentingnya peran aspek maritim dalam menunjang perekonomian Indonesia. Secara langsung Jokowi menyebut bahwa dengan menjaga laut, dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim global, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi (Sekretariat Kabinet RI, 2016).

Beberapa aspek ekonomi Indonesia bergantung pada sumber daya maritim dan perdagangan laut. **Sekarang kita juga merupakan pusat perekonomian dunia dan gravitasi politik, sebagai poros dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia...** Kita menyadari bahwa penggunaan sumber daya maritim harus dilakukan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Kita menyadari bahwa ini adalah tanggungjawab kita sebagai masyarakat global untuk mempertahankan laut. **Kami juga menyadari bahwa sebagai kekuatan diantara dua samudera, kami berkewajiban untuk mengambil peran dalam menjaga keamanan pelayaran** [cetak tebal ditambahkan] (Sekretariat Kabinet RI, 2016).

Dalam pidatonya tersebut, Jokowi menekankan identitas Indonesia sebagai poros maritim dunia. Penekanan pada upaya penggunaan laut sebagai poros

perdagangan dan sumber daya maritim yang menopang perekonomian menunjukkan bahwa Jokowi menginginkan Indonesia dipandang sebagai negara dengan identitas yang jelas. Caranya menyampaikan bahwa maritim merupakan masa depan yang harus dijaga sekaligus sebagai sumber daya yang menjanjikan, secara tidak langsung telah mendorong promosi ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi yang dilakukan menggunakan instrumen identitas Indonesia sebagai poros maritim dan menjanjikan perekonomian yang kuat di kawasan melalui aspek maritim.

Jokowi merupakan pemimpin yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Namun demikian, nasionalisme dalam kaitannya dengan kebijakan diplomasi ekonomi tidak dapat dikatakan sebagai rasa nasionalisme yang ekstrim. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa nasionalisme pada abad 21 cenderung bergeser sebagai nasionalisme ekonomi dan politik, dengan motif yang jelas yaitu kepentingan nasional dan agenda domestik suatu negara. Dalam hal ini, Jokowi mungkin membuka perekonomian Indonesia seluas-luasnya dan mengundang banyak kerjasama dengan negara lain, yang membuatnya seakan kurang nasionalis. Namun sebetulnya, ide dibalik keterbukaan ini adalah pencapaian kesejahteraan masyarakat, kepentingan domestik, yang jelas sekali merupakan cerminan nasionalisme. Melalui uraian diatas, daripada menyebut Jokowi memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, lebih relevan jika disebut bahwa Jokowi memiliki rasa nasionalisme yang moderat. Hal ini dilihat dari bagaimana ia melaksanakan kebijakannya yang melibatkan banyak pihak, dan cenderung melibatkan negara lain, ketimbang berfokus pada satu titik saja yaitu bangsanya.

III.3.2 *Belief in own ability to control*

Belief in own ability to control atau keinginan untuk mendominasi dan mengontrol keadaan diartikan oleh Hermann sebagai sebuah pandangan dimana seorang pemimpin merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menciptakan atau mengontrol suatu keadaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin memiliki keyakinan bahwa keadaan di dunia internasional berada di bawah kendalinya. Lebih lanjut, dalam konsep yang

disampaikan Hermann, ia menyatakan indikator lain selain kepercayaan pemimpin itu sendiri, yaitu; kemampuan pemerintah dalam mempengaruhi sebuah keadaan yang terjadi di dalam suatu negara atau terhadap suatu negara (Hermann, 1980). Tipe pemimpin konsiliator cenderung tidak memiliki rasa ingin mendominasi. Namun justru memiliki keinginan untuk menciptakan suatu keadaan dalam skema kerjasama. Sebaliknya pemimpin tipe agresif cenderung percaya bahwa suatu keadaan yang terjadi berada di bawah kendalinya.

Pada abad 21, seperti yang sudah disebutkan dalam bab sebelumnya, mekanisme kerjasama cenderung kepada *summit diplomacy* atau lebih kepada level pertemuan pemimpin negara (Czechowska, 2013). Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah pergeseran kepercayaan seorang pemimpin pada kemampuan tunggalnya untuk mengontrol suatu keadaan. Pasalnya, melalui mekanisme *summit diplomacy*, seorang pemimpin cenderung untuk mencari afiliasi pemimpin negara lain dalam menciptakan suatu keadaan. Namun demikian, kepercayaan seorang pemimpin dapat dilihat dari bagaimana ia menyampaikan ide atau pendapatnya melalui penekanan pada pemilihan kata yang merujuk pada penggunaan kata kerja yang mengindikasikan aksi maupun kepercayaan diri (Hermann, 1980).

Jika dikaitkan dengan kebijakan diplomasi ekonomi, Jokowi cenderung berusaha menciptakan suatu keadaan yang memungkinkan ia untuk mencapai kepentingannya, dalam hal ini adalah visi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Diplomasi ekonomi sendiri merupakan suatu agenda yang melibatkan banyak pihak (Moons & De Boer, 2014). Dengan kata lain, tidak mungkin suatu keadaan di bawah kebijakan diplomasi ekonomi hanya diciptakan oleh satu orang pemimpin maupun satu pemerintahan saja. Lebih dari itu, sudah pasti diperlukan banyak pihak untuk dapat mencapai keadaan yang diinginkan. Jokowi dengan kebijakan diplomasi ekonominya, dapat dikatakan ingin menciptakan suatu keadaan di bawah kontrolnya, yaitu stabilitas ekonomi Indonesia di bawah skema kebijakan diplomasi ekonomi. Pendapat Hermann mengenai kepercayaan seorang pemimpin terhadap kemampuan mengontrol suatu keadaan tidak lagi berada di bawah satu

individu saja seperti halnya di era abad 19, melainkan lebih dari satu. Jokowi dapat dikatakan memiliki kontrol yang tinggi atas stabilitas ekonomi dalam negeri, namun demikian tidak dapat dikatakan bahwa ia adalah satu-satunya orang di balik keadaan tersebut. Skema diplomasi ekonomi ditambah dengan mekanisme *summit diplomacy* tidak membiarkan stabilitas ekonomi berada di bawah kontrol satu orang pemimpin atau satu rezim pemerintahan saja. Lagi-lagi dalam aspek ini, Jokowi adalah pemimpin dengan tipe moderat.

Dalam pidatonya di *World Economic Forum* (WEF), Jokowi menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi perang dagang tanpa batas. Ia menyebutnya sebagai *Infinity War*, mengutip film *box-office; Avengers: Infinity War*. Jokowi menyebutkan bahwa perang dagang tanpa batas tersebut hanya bisa diakhiri jika semua negara mau melawan *Thanos* –karakter antagonis dalam *Avengers: Infinity War* yang ingin memusnahkan sebagian populasi dunia untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Dalam hal ini, analogi *Thanos* merupakan gambaran pemahaman yang salah mengenai persaingan dagang yang tidak sportif dan negatif kompetitif. Pada kesempatan ini, Jokowi juga menyampaikan bahwa ia percaya perekonomian dunia akan membaik dengan jalan kerjasama dan saling percaya. Ia juga mengungkapkan bahwa kepercayaannya terhadap kemampuan Indonesia dan ASEAN dalam Revolusi Industri 4.0 akan dapat mencegah perang dagang tanpa batas (Wirayani & Aditya, 2018).

Apa yang sedang terjadi dalam perekonomian dunia hari ini adalah kita sedang menuju perang tanpa batas (Infinity War). Kita belum pernah menghadapi perang dagang dengan eskalasi seperti ini sejak Great Depression di tahun 1930-an. ... Pada 4 April lalu, kami telah meluncurkan program pemerintah Revolusi Industri 4.0 yang diberi nama “Making Indonesia 4.0. Pertama, **saya percaya** bahwa Revolusi Industri 4.0 akan menciptakan bukannya menghilangkan banyak lapangan kerja tidak hanya dalam jangka panjang melainkan juga dalam jangka pendek. Kedua, **saya percaya** Revolusi Industri 4.0 tidak meningkatkan kesenjangan namun justru menurunkannya karena salah satu aspek penting dari Revolusi Industri 4.0 adalah penurunan biaya secara dramatis bagi barang dan jasa sehingga menyebabkan produk tersebut lebih murah dan mudah dijangkau bagi kalangan berpendapatan rendah. Ketiga, **saya percaya** ASEAN termasuk Indonesia akan menjadi yang terdepan dalam

Revolusi Industri 4.0. [cetak tebal ditambahkan] (Wirayani & Aditya, 2018).

Melalui pidatonya ini, Jokowi memiliki kepercayaan tinggi bahwa dengan menciptakan perdagangan yang sportif dan adil akan dapat menciptakan iklim perekonomian dunia yang stabil dan jauh dari ketimpangan. Ia menyebutkan bahwa Revolusi Industri merupakan jawaban untuk meningkatkan perekonomian dan menurunkan kesenjangan ekonomi, merupakan bukti bahwa ia memiliki kepercayaan bahwa kendali suatu keadaan berada di tangan pemangku kebijakan. Dalam hal ini Jokowi tidak menekankan kepercayaannya pada dirinya sendiri, melainkan juga seluruh pemimpin dunia. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, rasa percaya diri atas kemampuan memegang kendali dalam suatu keadaan tidak terlalu besar. Hal ini juga erat kaitannya dengan aspek kebutuhan afiliasi yang tinggi. Dalam pidato tersebut Jokowi tercatat menyebutkan diksi “saya percaya” sebanyak tiga kali yang menekankan pada kepercayaannya akan keefektifan kerjasama dalam Revolusi Industri 4.0.

Selain itu, dalam pidato analogi *Game of Thrones* dalam pertemuan IMF-WB di Bali, Jokowi menyampaikan bahwa perubahan dalam skema perekonomian dunia hanya bisa diubah dengan jalan kerjasama. Hal ini menunjukkan bahwa ia cenderung tidak memiliki ambisi untuk mendominasi. Namun demikian ada intensi untuk mendorong terciptanya suatu keadaan di bawah kendali bersama.

Dengan adanya kekhawatiran ancaman Evil Winter tersebut, **akhirnya mereka sadar**: tidak penting siapa yang duduk di Iron Throne **yang penting adalah kekuatan bersama** untuk mengalahkan Evil Winter agar bencana global tidak terjadi. Agar dunia tidak berubah menjadi tanah tandus yang porak poranda yang menyengsarakan kita semua [cetak tebal ditambahkan]. (Kusuma, 2018).

Dalam penggalan pidato tersebut, Jokowi menggunakan istilah *Evil Winter* untuk menggambarkan keadaan persaingan dagang yang semakin ketat dan menggunakan istilah *Iron Throne* untuk menggambarkan kekuatan *super power* dalam dunia internasional (The Conversation, 2018). Penggambaran kondisi pasar global yang Jokowi gunakan dengan menganalogikan serial *Game of Thrones*

merupakan caranya untuk mengajak banyak pemimpin dunia untuk menciptakan suatu kesadaran akan pentingnya kestabilan ekonomi global. Dapat dikatakan inilah cara Jokowi untuk mengarahkan suatu keadaan, meskipun tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya sendiri. Hal ini didukung kesimpulannya dalam pidato *Game of Thrones*:

... **Saya sangat berharap** Saudara-saudara akan berkontribusi dalam mendorong para pemimpin dunia untuk menyikapi keadaan ini secara tepat. Diperlukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang mampu menyangga dampak dari Perang Dagang, Disrupsi Teknologi dan ketidakpastian pasar [cetak tebal ditambahkan]. (Wirayani & Aditya, 2018).

Dalam pidatonya pada pertemuan dengan Presiden Putin, Jokowi menyebutkan di akhir pidatonya bahwa, ia percaya kerjasama ASEAN-Rusia bisa menjadi jalankeluar menyelesaikan masalah. Jokowi mengatakan, “Pada akhirnya, **saya yakin** bahwa kerjasama ASEAN-Rusia bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah pada tingkat regional-global [cetak tebal ditambahkan]” (Sekertariat Kabinet RI, 2018)

Jokowi menyebutkan dalam rapat kerja bersama kementerian Perdagangan bahwa kita merujuk pada pemerintah Indonesia, harus lebih optimis dalam melaksanakan kebijakan luar negeri khususnya pada konteks kerjasama ekonomi. Jokowi mengatakan, “**Mari kita lebih optimis, optimis tapi yang realistis**, harus berdasarkan kondisi dan perhitungan yang objektif [cetak tebal ditambahkan]” (Sekertariat Kabinet RI, 2017).

Dalam kunjungan balasan ke Korea Selatan tahun 2018 lalu, Jokowi juga menyampaikan bahwa ia mengharapkan adanya usaha dan hasil yang nyata dalam kerjasama antar kedua negara. Jokowi mengatakan, “Apa yang saya harapkan adalah adanya pengembangan dan penguatan lebih lanjut dalam kerjasama antar kedua negara. Dan **saya juga akan bekerja untuk memastikan kita bisa merealisasikan perubahan nyata** [cetak tebal ditambahkan]” (Jakarta Globe, 2018).

Penggalan pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Jokowi memiliki keyakinan akan mewujudkan suatu keadaan dan percaya bisa melakukannya dengan kontrol penuh, hal ini dapat dilihat melalui penggunaan kata “memastikan” yang cenderung memiliki makna yang merujuk pada keadaan pasti. Artinya, Jokowi

ingin membuat keadaan nyata yang pasti. Jokowi mengatakan, “**Di tengah bayak ketidakpastian di dunia, Indonesia dan Korea Selatan mampu membuktikan hubungan yang semakin kuat.** Perdagangan kita tahun 2017 naik 20 persen. Kita memiliki target perdagangan sebesar 30 miliar dollar AS untuk tahun 2022 [cetak tebal ditambahkan]” (Sekertariat Kabinet, 2018).

Jokowi juga menambahkan bahwa Indonesia dan Korea Selatan bisa membuktikan hubungan yang kuat ditengah ketidakpastian dunia, hal ini dapat dilihat sebagai kepercayaan untuk mengontrol keadaan dalam skema kerjasama.

Selain itu, jika dilihat melalui latar belakang kehidupan Jokowi, dimana ia terbiasa dipinggirkan, dan menjadi orang yang didominasi, mendorongnya untuk tidak melakukan hal yang sama ketika ia menjadi seorang pemimpin. Hal ini juga tercermin melalui kepemimpinannya di Asmindo, dan dua periode menjadi walikota Solo. Tidak terdapat indikasi tindakan yang bersifat mendominasi ditunjukkan oleh Jokowi (Endah, 2019). Jokowi tidak memiliki keinginan untuk mendominasi secara individu seperti penggambaran Hermann pada tipe pemimpin agresif, namun bukan berarti ia tidak memiliki keinginan untuk memiliki kontrol terhadap suatu keadaan. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam kebijakan diplomasi ekonomi, Jokowi memilih untuk mengontrol suatu keadaan dengan menggandeng pihak lain. Dalam aspek *belief in own ability to control*, Jokowi berada di tengah atau moderat, yang memiliki kecenderungan untuk menciptakan keadaan tertentu, namun tidak serta merta mengambil alih kendali atau kontrol sepenuhnya.

III.3.3 Need of Affiliation

Kebutuhan afiliasi dijelaskan oleh Atkinson (dalam Hermann, 1980) sebagai sebuah perhatian untuk membangun, menjaga, dan menjalankan hubungan yang hangat dan bersahabat. Biasanya seorang pemimpin dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi cenderung senang melakukan kerjasama baik dalam skema hubungan bilateral maupun multilateral. Pada skema hubungan bilateral, seorang pemimpin cenderung untuk memiliki kebutuhan terhadap satu sama lain.

Dilihat dari berbagai aspek yang melatarbelakangi kerjasama antar dua negara, kebutuhan afiliasi dapat dikatakan merupakan salah satu yang melatarbelakangi. Dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya, seorang pemimpin hampir mustahil untuk memenuhi kepentingan nasionalnya tanpa bantuan pihak lain. Bahkan seorang pemimpin agresif masih tetap membutuhkan afiliasi pihak lain, meskipun tidak setinggi pemimpin tipe konsiliator.

Skema kebijakan diplomasi ekonomi yang cenderung melibatkan banyak pihak, mulai dari awal perencanaan hingga tahap pelaksanaan, terlebih lagi kemitraan strategis, dimana negara satu dengan negara lain memang memiliki keterikatan khusus dalam berbagai aspek yang menjadi sektor kerjasama, serta didukung oleh adanya mekanisme *summit diplomacy* di abad 21, semakin mendukung kebutuhan afiliasi seorang pemimpin negara dalam melaksanakan kebijakan luar negeri. Dalam pelaksanaan kebijakan diplomasi ekonomi, Jokowi mengerahkan segala aspek dalam pemerintahannya, untuk mempromosikan perekonomian Indonesia dan mendorong pertumbuhan investasi asing. Lebih dari itu, tujuan utama dalam diplomasi ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Hal ini seperti yang sudah disebutkan dalam indikator sebelumnya, bahwa tidak mungkin stabilitas ekonomi dapat dicapai tanpa adanya bantuan pihak lain. Jokowi menjalin kemitraan strategis dengan Korsel, bahkan sampai meningkatkan statusnya menjadi khusus dilatarbelakangi oleh kebutuhan afiliasi dari partner kerjasama untuk mencapai tujuan strategis (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2017).

Pada awal kepemimpinannya, Jokowi menghadiri APEC CEO *Summit* yang diselenggarakan pada 10 November 2014 di Beijing, Tiongkok. Dalam kesempatan ini, Jokowi mendapat kesempatan untuk menyampaikan presentasinya mengenai potensi ekonomi Indonesia dan kesempatan investasi dengan pemimpin perusahaan. Dalam presentasinya Jokowi sering menyebutkan diksi "*this is your opportunity*" –dalam bahasa Indonesia; "ini merupakan kesempatan anda", dalam konteks keterbukaan terhadap investasi. Tercatat, Jokowi menyebutkan frasa "ini merupakan kesempatan anda" sebanyak lima kali dalam presentasinya di APEC CEO *Summit* tahun 2014. Hal ini sekaligus

mengafirmasi bahwa Jokowi membuka kesempatan untuk investasi asing yang sebesar-besarnya.

Dalam lima tahun kami ingin membangun 24 pelabuhan. ... **ini adalah kesempatan kalian.** ...Gambar menunjukkan pelabuhan Jakarta kami, Tanjung Priok. Tahun 2009, kapasitasnya mencapai 3.6 miliar per tahun, dan rencana kami tahun 2017 akan mencapai 15 miliar per tahun. Ini adalah pelabuhan potensial di Indonesia. **Ini adalah kesempatan anda.** ...Kami berencana membangun jaringan rel kereta api. **Ini adalah kesempatan kalian.** ...Sekarang kita bicara mengenai transportasi masa. Kami ingin membangun transportasi masa di enam kota besar di Indonesia. ... **Jadi, ini juga kesempatan kalian.** ...Listrik. Kami membutuhkan pembangkit energi. Kami membutuhkan sekitar 35.000 megavolts untuk membangun industri kami. Jadi kami membutuhkan pembangkit energi, **ini juga adalah kesempatan anda semua.** ...Terakhir, atas nama pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, saya ingin mengucapkan terimakasih. **Kami menunggu anda semua untuk datang ke Indonesia. Kami menunggu anda semua untuk berinvestasi di Indonesia** [cetak tebal ditambahkan]" (Rappler.com, 2014)

Di akhir presentasi, Jokowi mengundang para CEO untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi membutuhkan afiliasi untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam pernyataan Jokowi dalam pidatonya untuk pertemuan IMF-WB di Bali 2018 lalu, dimana ia menggunakan analogi *Game of Thrones*. Jokowi menyampaikan bahwa kerjasama adalah kunci menyelesaikan permasalahan global, dalam hal ini terkait dengan kondisi ekonomi dan perdagangan global (Kusuma, 2018).

"... Ancaman Global yang tumbuh pesat tersebut yang hanya bisa kita tanggulangi jika **kita bekerja bersama.** ...untuk itu kita harus **bekerja bersama** menyelamatkan kehidupan bersama kita [cetak tebal ditambahkan]" (Kusuma, 2018).

Untuk itu kita harus bertanya: Apakah sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi? Ataukah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk **kerja sama dan kolaborasi**? Apakah kita telah terlalu sibuk untuk bersaing dan menyerang satu sama lain sehingga kita gagal menyadari adanya ancaman besar yang membayangi kita semua? Apakah kita gagal menyadari adanya ancaman besar yang dihadapi oleh negara

kaya maupun miskin? Oleh negara besar ataupun negara kecil? (Wirayani & Aditya, 2018).

Dalam penggalan pidato tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa permasalahan global hanya dapat ditanggulangi melalui kerjasama. Kata ‘kerjasama’ merujuk pada kebutuhan akan partner dalam mengerjakan sesuatu. Ini menunjukkan adanya kebutuhan afiliasi yang tinggi. Lebih dari itu, kecenderungan Jokowi untuk menyebut ‘kita’ dalam pidato tersebut, tidak serta merta hanya merujuk pada kata ‘kita’ sebagai Indonesia, melainkan merujuk pada seluruh pemimpin dunia yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pidato tersebut, Jokowi menganalogikan bagaimana perekonomian global merupakan fenomena munculnya *Evil Winter* dalam serial *Game of Thrones*, dimana jalan satu-satunya dalam menghadapinya adalah melalui kerjasama antar *houses*. Hal ini menunjukkan bagaimana Jokowi merupakan pemimpin dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi.

Selain itu, dalam pidatonya pada pertemuan *International Maritim Organization* (IMO) (Sekretariat Kabinet RI, 2016), Jokowi juga menekankan pada kerjasama internasional untuk mencapai kesejahteraan dunia melalui sektor maritim. Jokowi mengatakan, “Indonesia paham bahwa masa depan kesejahteraan dunia tergantung pada bagaimana kita mengelola laut dan kita bisa mencapainya dengan menjaga laut, yang merupakan milik kita, milik semua bangsa, melalui **kerjasama internasional**, khususnya melalui IMO [cetak tebal ditambahkan]” (Sekretariat Kabinet RI, 2016). Pidatonya yang berkaitan dengan aspek maritim ini juga berkaitan erat dengan kebijakan diplomasi ekonomi. Pasalnya diplomasi ekonomi diimplementasikan pada hampir seluruh aspek ekonomi, termasuk di dalamnya maritim. Dalam kemitraan strategis dengan Korsel pun, terdapat aspek kerjasama maritim, yaitu pada pembuatan kapal selam dan armada keamanan laut (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2017).

Dalam kesempatan lain, Jokowi juga seringkali mengungkapkan bahwa kerjasama adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Misalnya dalam pertemuan dengan negara-negara mitra bisnis Indonesia.

Kerjasama dalam bidang ekonomi digital tidak hanya merupakan sebuah pilihan, namun juga sangat penting. Ini akan menjadi prioritas Indonesia dan Singapura [cetak tebal ditambahkan]. (The Jakarta Post, 2017).

Pertemuan hari ini menandai peningkatan **kerjasama ASEAN-Rusia sebagai mitra strategis** [cetak tebal ditambahkan]. (Sekertariat Kabinet RI, 2018).

Bagaimanapun juga, kita perlu meningkatkan usaha untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi dengan memanfaatkan berbagai potensi **kerjasama ekonomi** yang ada dan **mendorong interaksi pengusaha** [cetak tebal ditambahkan]. (Sekertariat Kabinet RI, 2018).

Dalam KTT ASEAN-India di Singapura, Jokowi membahas peningkatan kerjasama maritim untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kawasan. Ia menyebutkan laut sebagai kunci kemitraan ASEAN-India, lebih dari itu, Jokowi juga mengindikasikan kecenderungan multilateralisme dengan menyebutkan “*common destiny*” untuk menyebut kepentingan bersama. Ia mengatakan, “**Kerjasama maritim adalah kunci utama kemitraan ASEAN-India**. Laut yang aman adalah ‘**common destiny**’ kita [cetak tebal ditambahkan].” (Liputan6.com, 2018). Dalam pidatonya pada pertemuan ASEAN *plus Three*, Jokowi menyebut bahwa kerjasama kawasan harus ditingkatkan dan sebisa mungkin dapat menjadi solusi bagi fluktuasi nilai tukar di negara-negara kawasan. Jokowi mengatakan, “Situasi ekonomi global berdampak serius bagi negara-negara di **kawasan**. Capital outflow yang besar mengakibatkan fluktuasi nilai tukar. **Kerjasama APT** harus menjadi bagian dari solusi global [cetak tebal ditambahkan].” (CNBC Indonesia, 2018). Hal tersebut diperkuat dengan pengalaman hidupnya yang berjuang menjadi pengusaha, dengan bantuan dana sokongan program pemerintah ia dapat mendirikan CV. Rakabu. Lebih dari itu, ia juga menghimpun afiliasi melalui Asmindo untuk melakukan program-program pemberdayaan pengusaha mebel di Solo (Endah, 2019). Dalam aspek ini, dapat dikatakan bahwa Jokowi merupakan pemimpin dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi. Kebutuhan afiliasi dalam hal ini tidak banyak mengalami pergeseran seperti dua aspek sebelumnya. Yang berbeda hanyalah pada intensitas kebutuhan afiliasi yang menjadi lebih intens melalui mekanisme *summit diplomacy*

ketimbang dalam forum multilateral maupun regional. Namun demikian, Jokowi juga dapat dikatakan cukup aktif dalam menghadiri forum-forum multilateral, hal ini menunjukkan kebutuhan afiliasi yang tinggi dalam menghimpun investasi dan dukungan internasional.

III.3.4 *Conceptual complexity*

Conceptual complexity berkaitan erat dengan cara pandang individu dan cara individu tersebut mengolah informasi yang dia dapat. Individu yang memiliki tingkat kompleksitas konseptual yang rendah cenderung memandang segala sesuatu secara dikotomi atau hitam dan putih. Seperti halnya menggolongkan “*us and them*”, “*friend and enemy*” dan “*good and evil*”. Sebaliknya, individu dengan kompleksitas konseptual yang tinggi melihat dunia melalui nuansa “abu-abu” sehingga cenderung mencari alternatif dan menerima pandangan pihak lain. Hermann mengkodifikasikan *conceptual complexity* dengan penggunaan kata yang ambigu dan implisit untuk kategori kompleksitas konseptual yang tinggi, dan sebaliknya menggunakan kata-kata yang eksplisit dan terus terang untuk kompleksitas konseptual rendah (Hermann, 1980)

Jokowi dapat dikatakan memiliki kompleksitas konseptual yang rendah dilihat dari bagaimana ia menyampaikan ide terkait kebijakannya dan bagaimana ia menggambarkan suatu keadaan. Jokowi memiliki kecenderungan untuk menyampaikan sesuatu secara terang-terangan dan eksplisit. Dalam beberapa pernyataannya, Jokowi cenderung menggunakan pemilihan kata yang memiliki penggambaran langsung, misalnya “saya senang”, “saya mengundang...”, “saya menyambut...”, “saya meminta dukungan”, “saya berharap”, “saya akan ...”.

Misalnya dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Jokowi menyinggung mengenai kerjasama ekonomi digital yang merupakan kerjasama masa depan yang menjanjikan antara Indonesia dan Singapura. Jokowi juga menyampaikan bahwa kerjasama tersebut tidak hanya sebuah pilihan melainkan kerjasama yang amat penting. Disini Jokowi juga menyampaikan rencananya dengan gamblang, bahwa jika kedua negara bekerjasama maka akan meningkatkan perekonomian kedua negara.

Kerjasama ekonomi digital tidak hanya merupakan sebuah pilihan, melainkan merupakan hal yang sangat penting. **Jika kita bisa mengombinasikan potensi investasi, teknologi, kemampuan dan potesi pasar anak muda, kerjasama ekonomi digital akan meningkatkan perekonomian kedua negara menjadi lebih kuat** [cetak tebal ditambahkan]. (The Jakarta Post, 2017).

Dalam pernyataan tersebut, Jokowi dengan gamblang mengungkapkan tujuan pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura. Dapat dilihat dari pengandaian yang terus terang dan secara eksplisit menyampaikan rencana kerjasama keduanya, tidak ada yang ditutup-tutupi.

Selain itu, ia juga sempat bertemu dan berdiskusi dengan Xi Jinping di sela-sela KTT APEC di Papua Nugini tahun 2018 lalu, Jokowi menyampaikan mengenai rencana kerjasama dalam ekonomi digital dengan Tiongkok dan menyampaikan beberapa hal. Namun yang paling terlihat adalah caranya dalam meminta Presiden Xi untuk mendorong warganya berkunjung ke Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan secara langsung dan terang-terangan. Jokowi mengatakan, **“Saya berharap** Indonesia dan Tiongkok bisa bekerja sama dalam menurunkan defisit perdagangan dengan Tiongkok. **Saya juga meminta** Presiden Xi untuk mendorong kunjungan turis Tiongkok ke Indonesia, khususnya ke Bali dan ‘10 New Balis’ [cetak tebal ditambahkan].” (TheJakartaPost, 2018).

Dalam kesempatan bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Jokowi juga menunjukkan karakter yang sama. Ia banyak menggunakan kata-kata yang secara eksplisit mengandung permintaan kerjasama. Ia banyak menggunakan frasa “saya mengundang”, “saya menyambut”, dan banyak pernyataannya yang mengandung permintaan langsung.

Saya menyambut peningkatan dalam kerjasama perdagangan kita. ...**Saya berharap** target perdagangan sebesar USD 5triliun bisa dicapai di tahun 2020. ...**Kami meminta dukungan** promosi dan kampanye positif untuk minyak sawit mentah Indonesia. ...**Saya berharap Rusia** sebagai pimpinan EAEU, **bisa membantu mempercepat** keputusan kolektif untuk memulai perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan EAEU,

terlebih untuk merespon pengumpulan prosedur yang sudah dikumpulkan sejak 2017 [cetak tebal ditambahkan]. (Sekertariat Kabinet RI, 2018).

Dalam pernyataan pers bersama peningkatan status kemitraan strategis Indonesia dan Korea Selatan tahun 2017 lalu, Jokowi juga mengungkapkan secara gamblang bahwa ia senang dengan kedatangan Presiden Moon yang membawa rombongan bisnis dalam jumlah besar. Jokowi mengatakan, “... **saya senang karena kunjungan Presiden Moon disertai dengan delegasi bisnis yang cukup besar.** Dan bagi Indonesia, Korea Selatan merupakan mitra yang sangat strategis terutama di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi [cetak tebal ditambahkan].” (KompasTV, 2017).

Dalam kunjungannya ke Korea Selatan pada September 2018, Jokowi memberikan pernyataan terkait dengan kerjasama kedua negara, ia menyampaikan bahwa kedua negara telah memiliki target yang jelas serta ia secara pribadi berharap dapat melihat perubahan signifikan dari kerjasama yang dijalin.

Kami sudah menetapkan target perdagangan bilateral agar mencapai \$30 triliun di tahun 2022. **Saya juga berharap** dapat melihat usaha lebih lanjut untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan antar negara dan **saya akan bekerja untuk memastikan kita bisa merealisasikan perubahan yang nyata** [cetak tebal ditambahkan] (Jakarta Globe, 2018).

Jokowi sudah terbiasa menyampaikan sesuatunya secara langsung dan gamblang tanpa basa-basi sejak masih menjadi walikota Solo. Hal ini dapat dilihat melalui bagaimana ia menginginkan dialog terbuka dan mendengar langsung keluhan masyarakat melalui blusukan. Jokowi cenderung menginginkan semuanya jelas dan praktis (Ambarita, 2013). Hal ini terbukti ketika pemerintah Kota Solo punya rencana memindahkan PKL. Di saat semua partner kerjanya mengatakan untuk menggunakan cara koersif agar lebih cepat, Jokowi justru menggunakan caranya sendiri yaitu dengan diplomasi makan siang. Dapat dilihat bahwa Jokowi cenderung melihat dengan caranya sendiri dan cenderung acuh dengan pendapat yang menurutnya tidak dapat menyelesaikan masalah. Jokowi

juga merupakan tipe yang memiliki pemikiran praktis dan menginginkan segalanya berjalan cepat dan sesuai dengan keinginannya (Ambarita, 2013).

Dengan pemikiran praktis dan karakternya yang terus terang, Jokowi dapat dikatakan memiliki kompleksitas konseptual yang cenderung rendah. Caranya menyampaikan ide, gagasan dan pernyataan di muka publik sangat terus terang dan apa adanya. Demikian halnya dalam pertemuan dengan negara lain, maupun dalam forum global, Jokowi cenderung mengutarakan maksudnya secara eksplisit dan langsung pada poin tanpa basa basi. Hal ini memenuhi kodifikasi Hermann mengenai tipe pemimpin agresif yang cenderung memiliki kompleksitas konseptual yang rendah.

III.3.5 *Distrust of others*

Rasa tidak percaya terhadap orang lain ini diartikan sebagai perasaan ragu, dan curiga terhadap motif dan sikap pihak lain. Rasa tidak percaya ini dapat dilihat melalui pernyataan yang terkesan menghindari atau jauh dari kata “dengan” dan “bersama” (Hermann, 1980). Dalam hubungan bilateral, seorang pemimpin sudah dapat dipastikan memiliki rasa tidak percaya yang rendah terhadap partnernya. Perlu diingat bahwa hubungan bilateral antar negara membutuhkan rasa saling percaya yang tinggi. Dalam skema kemitraan strategis, kedua negara mengafirmasi bahwa keduanya memiliki persahabatan yang kuat, dan rasa percaya yang tinggi satu sama lain. Hal ini tertuang dalam *Joint Vision Statement on Co-prosperity and Peace* (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2017).

Sikap terbuka terhadap kerjasama ekonomi, perdagangan bebas, dan investasi asing merupakan salah satu bukti bahwa Jokowi merupakan tipe pemimpin yang memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pihak luar. Lebih dari itu, skema diplomasi ekonomi yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya (Moons & De Boer, 2014), mencerminkan bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang bisa bekerja dengan orang lain, hal ini sekaligus mengafirmasi bahwa Jokowi memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap pihak lain. Dapat dilihat melalui pidatonya pada pertemuan IMF-WB di Bali dimana ia

banyak mengapresiasi kesuksesan para pembuat kebijakan moneter dalam mengatasi krisis finansial global.

Sepuluh tahun yang lalu, kita mengalami Krisis Finansial Global. Berkat langkah-langkah kebijakan moneter dan fiskal yang luar biasa, yang membutuhkan keberanian politik yang besar. Saudara-saudara para pembuat kebijakan, telah menyelamatkan dunia dari depresi global yang pada waktu itu sudah di depan mata. Untuk itu, kami menyampaikan selamat atas kesuksesan saudara-saudara dalam mengatasi Krisis Finansial Global tahun 2008. ... Kami bergantung pada saudara-saudara semua para pembuat kebijakan moneter dan fiskal dunia untuk menjaga komitmen kerjasama global. Saya sangat berharap Saudara-saudara akan berkontribusi dalam mendorong para pemimpin dunia untuk menyikapi keadaan ini secara tepat. Diperlukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang mampu menyangga dampak dari perang dagang, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian pasar [cetak tebal ditambahkan] (Kusuma, 2018).

Dalam penggalan pidato kedua, Jokowi menggunakan kata ‘bergantung’ untuk membahasakan bahwa negara-negara berkembang sangat membutuhkan kebijakan ekonomi global yang dapat menjaga kestabilan ekonomi, sekaligus mendorong iklim kerjasama global yang sportif.

Selain itu dalam pernyataan pers bersama dalam kunjungan Presiden Moon ke Bogor, Jokowi menyebut Korea Selatan sebagai mitra. Kata “mitra” merupakan representasi kepercayaan antar dua negara. Jokowi mengatakan, “Dan bagi Indonesia, Korea Selatan merupakan **mitra yang sangat strategis terutama di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi** [cetak tebal ditambahkan]” (KompasTV, 2017). Sehingga dapat dikatakan bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang memiliki rasa tidak percaya yang rendah terhadap pihak lain. Hal ini didukung oleh posisinya sebagai pebisnis sebelum menjadi seorang politikus, dimana menjadi seorang pebisnis artinya membangun kepercayaan dengan klien dan mitra bisnis (Endah, 2019). Jokowi mengatakan, “Pertemuan hari ini menandai peningkatan dalam hubungan ASEAN-India sebagai **mitra strategis** [cetak tebal ditambahkan].” (Liputan6.com, 2018). Dalam kesempatan wawancara dengan situs berita Bloomberg Market and Finance, Jokowi seringkali menyebut

bahwa Indonesia merupakan negara yang terbuka. Hal ini menggambarkan bahwa Jokowi sangat percaya pada mekanisme kerjasama internasional dan membuka diri. Keterbukaan Indonesia terhadap investasi dan perdagangan global merupakan cermin kepercayaan terhadap pihak lain. Jokowi mengatakan, “...**Jadi kita sudah banyak membuka untuk investasi asing dari daftar negatif kita sudah buka**, saya kira itu tidak hanya satu, dua atau tiga tapi banyak, ini menunjukkan bahwa **Indonesia itu terbuka** [cetak tebal ditambahkan].” (Bloomberg Market and Finance, 2017).

Dapat dikatakan bahwa Jokowi merupakan pemimpin dengan tingkat kecurigaan terhadap pihak lain yang rendah. Hal ini sejalan dengan visi diplomasi ekonomi yang mempromosikan perekonomian domestik dan mengundang investasi asing. Penekanan pada keterbukaan ekonomi merupakan sebuah cerminan bahwa Jokowi mempercayai kekuatan kerjasama dalam mencapai tujuan strategis. Seorang pemimpin tidak akan meningkatkan status kemitraan strategis dengan partner yang tidak dipercaya. Lebih dari itu, dalam kemitraan strategis dengan Korea Selatan, Indonesia menekankan rasa percaya melalui kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2017). Rasa tidak percaya yang rendah ini juga didukung dengan aspek kebutuhan afiliasi yang tinggi serta rendahnya keinginan untuk mendominasi. Jokowi adalah pemimpin yang mempercayai mekanisme kerjasama untuk mencapai kepentingan nasional, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Jokowi memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap pihak lain.

III.4 Kesimpulan

Latar belakang kehidupan Jokowi yang cenderung menjadi orang terpinggirkan dan sering didominasi mendorong Jokowi untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang pro-rakyat. Melalui kebijakan luar negeri yang berfokus pada kepentingan domestik, ia mendorong kerjasama bilateral yang sebenar-benarnya mampu mencapai kepentingan domestik, terutama di bidang perekonomian. Praktek kebijakan diplomasi ekonomi melatarbelakangi kemitraan strategis Indonesia dengan banyak negara, salah satunya Korea Selatan. Kerjasama yang

dibangun dalam skema kemitraan strategis menstimulasi pencapaian tujuan strategis sesuai dengan kebijakan domestik. Faktor idiosinkratik Jokowi dalam hal ini memainkan peran penting. Jokowi merupakan pemimpin yang dapat dikatakan moderat atau berada diantara tipe agresif dan konsiliator yang dikemukakan Hermann. Pertama, Jokowi memiliki rasa nasionalisme yang cenderung tinggi, namun tidak membuat ia dan negaranya menutup diri dari dunia internasional. Hal ini cenderung bertolak belakang dengan konsepsi Hermann terkait nasionalisme yang cenderung tradisional dan ekstrim. Kedua, Jokowi memiliki kepercayaan yang cukup tinggi dalam mengontrol suatu keadaan atau menginisiasi keadaan, namun ia juga membuka kesempatan untuk menghadirkan kerjasama dalam menciptakan suatu keadaan. Hal ini juga sedikit menyimpang dari konsepsi Hermann mengenai kepercayaan diri pemimpin dalam mengontrol suatu keadaan. Pemimpin dengan kepercayaan tinggi cenderung bersifat individual. Ketiga, Jokowi memiliki keenderungan kebutuhan afiliasi yang tinggi, terbukti dari caranya membangun kerjasama dengan negara lain melalui skema diplomasi ekonomi dan kemitraan strategis. Keempat, Jokowi memiliki kompleksitas konseptual yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari caranya menyampaikan gagasan yang cenderung terang-terangan dan seringkali mengandung makna yang eksplisit. Jokowi juga terbiasa melihat suatu hal melalui kacamatanya sendiri, dan cenderung tidak mendengarkan pihak lain. Terakhir, Jokowi memiliki kecenderungan untuk percaya pada pihak lain dan tidak memiliki kecurigaan berlebih terhadap pihak lain. Karakter moderat inilah yang mendorong Jokowi untuk meningkatkan status kemitraan strategis antara Indonesia-Korea Selatan menjadi khusus. Namun demikian, uraian di atas juga menunjukkan bahwa, analisis faktor idiosinkretik tidak dapat disandingkan secara langsung dengan skema kerjasama bilateral, melainkan harus disandingkan dengan analisis kebijakan luar negeri yang melandasi kerjasama tersebut.